

## PEMAHAMAN PENDIDIKAN POLITIK MAHASISWA UNIVERSITAS BUNG KARNO (STUDI KASUS: *MONEY POLITICS* PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024)

Nur Azizah<sup>1\*</sup>,

Riza Azahra Choirunnisa<sup>2\*</sup>

Intan Safitri<sup>3\*</sup>

<sup>\*1</sup>Universitas Bung Karno, Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Ilmu Politik, Jakarta, Indonesia. <sup>2</sup>Universitas Bung Karno, Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Ilmu Politik, Jakarta Pusat, Indonesia.

<sup>3</sup>Universitas Bung Karno, Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Ilmu Politik, Jakarta Pusat, Indonesia.

\*nengsirnarasa@gmail.com

[\\*rizaaazahra2@gmail.com](mailto:*rizaaazahra2@gmail.com), [\\*intanssaa@gmail.com](mailto:*intanssaa@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya peningkatan praktik *money politics* yang terjadi selama Pemilihan Umum Legislatif 2024. Peningkatan *money politics* selama kampanye pemilihan umum ini menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat terutama mahasiswa, terhadap dampak dari *money politics* pada demokrasi. Mahasiswa cenderung mencontoh perilaku dan sikap dari individu yang mereka anggap sebagai panutan. Jika model-model yang mereka amati terlibat dalam praktik politik uang, maka mahasiswa juga cenderung menerima praktik tersebut sebagai hal yang tidak aneh.

Tujuan penelitian yaitu untuk memahami pemahaman mahasiswa Universitas Bung Karno terkait pendidikan politik, khususnya dalam konteks *money politics* pada Pemilihan Umum Legislatif 2024.

Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat mengidentifikasi tingkat pemahaman mahasiswa tentang konsep *money politics*, dampaknya terhadap demokrasi, serta peran mahasiswa dalam mencegah praktik tersebut. Teori yang digunakan adalah teori Pendidikan politik, secara umum, dapat diartikan sebagai proses pembentukan individu yang mampu memahami dan menyadari posisi politik mereka dalam masyarakat, yang menunjukkan bahwa pendidikan politik memiliki peran penting dalam membentuk cara berpikir dan tanggung jawab seorang warga negara. Disebabkan, untuk memahami *money politics* masyarakat harus tahu tentang pendidikan politik dan mempelajarinya, karena pendidikan politik bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman politik di kalangan masyarakat, sehingga mereka mempunyai kesadaran politik dan tingkat partisipasi yang tinggi dalam kehidupan politik, pendidikan politik harus dianggap sebagai hal yang sangat penting.

Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, yang berasal dari studi literatur dan wawancara mendalam dengan beberapa mahasiswa FISIP Program Studi Ilmu Politik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan program pendidikan politik di perguruan tinggi.

**Keywords:** Pendidikan Politik, Pemilu Legislatif, Kampanye, *Money Politics*, Mahasiswa

## PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Pancasila yang melibatkan masyarakat untuk ikut serta dengan langsung atau melalui perwakilan dalam proses perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung adanya kebebasan politik bagi seluruh rakyat. Salah satu bentuk kebebasan politik yang dimiliki rakyat adalah hak untuk memberikan suara pada Pemilu yang berberfungsi sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [1]

Kampanye dalam Pemilu merupakan salah satu langkah utama sehingga tidak dapat dipisahkan dari proses pemilu itu sendiri. Kampanye bertujuan untuk memperkenalkan calon kepada masyarakat. Melalui kampanye, para aktivis politik dapat mencari dukungan dari berbagai kelompok pemilih. Kampanye dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan komunikasi yang terencana, bertujuan untuk memberikan dampak tertentu kepada kelompok sasaran dalam jumlah banyak, dan dilakukan secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu [2]

Proses pemilihan umum dapat dilihat dari pelaksanaan kampanye, di mana tahapan kampanye digunakan untuk menarik perhatian publik. Calon anggota legislatif bersaing untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin. Dalam persaingan ini, tidak jarang calon legislatif menggunakan berbagai cara untuk meraih suara terbanyak, yang dapat mengakibatkan pelanggaran dalam kampanye. Akibatnya, suara pemilih

menjadi kurang berarti karena proses yang dipenuhi dengan kecurangan, ketidakadilan, dan tidak demokratis. Oleh karena itu, kampanye dapat dianggap sebagai tindakan komunikasi terorganisasi yang ditujukan kepada audiens tertentu dalam periode tertentu untuk mencapai tujuan tertentu [3]

Salah satu contoh pelanggaran kampanye yang sering terjadi adalah politik uang. Politik uang adalah fenomena yang umum terjadi menjelang pemilihan umum. Meskipun telah dilakukan sosialisasi untuk mengurangi praktik curang ini, fenomena tersebut masih sulit dihilangkan. Praktik politik uang biasanya dilakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan harapan mereka akan memilih calon tersebut, yang merupakan penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi. Namun, ada juga masyarakat yang lebih rasional dan memanfaatkan situasi ini; mereka menerima uang dari caleg tetapi tidak memilih mereka saat pemilihan. Mereka memilih pemimpin bukan berdasarkan penerimaan uang.

Pelanggaran politik uang sering terjadi terus menerus dan menjadi kebiasaan dalam setiap periode Pemilu. Jika praktik ini berlanjut, harapan untuk mendapatkan pemimpin yang adil, berintegritas, dan khidmat kepada rakyat sulit tercapai, karena pemimpin-pemimpin tersebut muncul melalui cara yang tidak fair. Hal ini tentu berefek negatif pada tatanan demokrasi yang dibangun pemerintah dan memunculkan persepsi bahwa penyelenggara pemilu mungkin terpengaruh oleh kepentingan tertentu, sehingga menghambat pengembangan nilai-nilai demokrasi, kejujuran, dan keadilan.[4]

## TEORI DAN METODE METODE PENELITIAN

Pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pemahaman politik kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran politik dan tingkat partisipasi yang tinggi dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, pendidikan politik tidak boleh dianggap remeh. Kartono (dalam Hartono, 2016, hlm. 10) menyatakan bahwa pendidikan politik dikenal sebagai *Political Forming* atau *Political Building*. Istilah *Political Forming* digunakan karena ada niat untuk membentuk individu yang menyadari status politiknya di masyarakat. Sementara itu, istilah *Political Building* merujuk pada aktivitas pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh untuk menjadi individu politik yang baik. [5]

Secara umum, pendidikan politik dapat dipahami sebagai proses pembentukan individu yang mampu memahami dan menyadari posisi politik mereka dalam

masyarakat, pendidikan politik memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan tanggung jawab seorang warga negara. Selain itu, pendidikan politik juga merupakan elemen krusial dalam upaya pembaruan kehidupan politik. Pasaribu (2017, hlm. 56) menyatakan bahwa pendidikan politik adalah “usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk meraih pembaruan dalam kehidupan politik sehari-hari, dalam rangka menciptakan masyarakat sejahtera yang dapat diterima baik secara formal maupun non-formal.” [6]

Pendidikan politik sangat penting dalam suatu negara. Sukarna (dalam Pasaribu, 2017, hlm. 56) menyoroti bahwa pendidikan politik adalah syarat mutlak untuk mendidik masyarakat agar memiliki kesadaran bernegara dan berbangsa. Di negara yang belum merdeka, pendidikan politik ditekankan untuk menjaring kader-kader yang ingin mencapai kemerdekaan. Di negara yang sudah merdeka, pendidikan politik tetap diperlukan agar kemerdekaan bangsa dan negara tidak hilang atau terjajah kembali dalam bentuk penjajahan yang lebih halus.

Secara umum, tujuan pendidikan politik adalah untuk mendidik kesadaran bernegara dan berbangsa, sehingga kemerdekaan bangsa dan negara tetap terjaga. Djiwandono (dalam Pasaribu, 2017, hlm. 57) menyatakan bahwa pendidikan politik adalah proses penyampaian budaya politik bangsa yang mencakup cita-cita politik, norma-norma operasional, dan sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang penting bagi seluruh rakyat.

Pendidikan politik juga berfungsi untuk menumbuhkan skeptisisme politik dan wawasan tentang peristiwa politik melalui berbagai saluran. Dengan cara ini, masyarakat dapat menjalankan fungsi kontrol politik dan menganalisis realitas politik saat ini. Skeptisisme yang dimaksud di sini adalah skeptisisme ilmiah, yang menghindari sikap mudah percaya dan naif, seperti keyakinan yang ceroboh terhadap ‘kebenaran’ mitos politik, doktrin, dan propaganda yang dapat melemahkan daya kognitif kita.

Oleh karena itu, pendidikan politik dapat mendorong seluruh warga negara untuk memahami dan menarik kesimpulan dari setiap peristiwa politik dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang valid secara ilmiah, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat mengenai peristiwa tersebut.

Metode penelitian dalam studi ini adalah kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut Danim (2002), penelitian kualitatif

berasumsi bahwa kebenaran bersifat dinamis dan hanya dapat ditemukan dengan mempelajari orang-orang melalui interaksi mereka dengan situasi sosial. Penelitian kualitatif menggunakan strategi interaktif dan fleksibel untuk mengeksplorasi perspektif partisipan, dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial. [7]

Metode deskriptif kualitatif Menurut Wekke et al. (2019:35) bertujuan untuk mencari teori. Ciri utamanya adalah peneliti terlibat langsung di lapangan, bertindak sebagai pengamat, mengkategorikan pelaku, mengamati fenomena, mencatatnya dalam buku observasi, tidak memanipulasi variabel, dan menekankan pada observasi alami.

[8]

## PEMBAHASAN

Setelah wawancara dengan beberapa mahasiswa Universitas Bung Karno. diketahui bahwa mereka memiliki pemahaman yang jelas mengenai istilah *money politics*. Mereka menyadari bahwa *money politics* biasa terjadi menjelang kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Mereka mengakui bahwa praktiknya masih berlangsung hingga saat ini, dan realitanya yaitu tanpa adanya *money politics* sulit bagi calon untuk meraih dukungan. Adanya kesadaran bahwa *money politics* merupakan tindakan yang dapat merusak demokrasi bangsa, karena kurangnya pendidikan politik bagi masyarakat terutama masyarakat kalangan menengah kebawah, yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan praktik ini. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa ada dua faktor utama yang membuat masyarakat menormalisasikan *money politics* dikarenakan terdapat tekanan ekonomi yang mendesak dan kurangnya pendidikan politik mengenai dampak negatif dari praktik tersebut.

Salah satu informan mengatakan 'faktor utama maraknya *money politics* adalah dari sumber daya manusia yang tidak memikirkan boleh atau tidak praktik *money politics* berlangsung, mereka hanya berpikir untuk kepentingan pribadi karena kebutuhan yang mendesak, seperti sembako murah kemudian mereka disuruh memilih calon tertentu. Setelah itu, terserah mereka akan memilih calon tersebut atau tidak.'

Ada juga yang mengatakan *money politics* masih sering terjadi 'karena politik kita masih politik transaksional. Masyarakat mengharapkan imbalan atau sesuatu dari calon-calon nya walaupun dari segi aturan itu salah.'

Kemudian informan lain mengatakan bahwa 'kurangnya tingkat pemahaman politik masyarakat, tidak mengetahui bahwa *money politics* itu dilarang oleh negara dan yang kedua pemahaman tentang masyarakat yang tidak mau mengetahui apa visi-misi calon yang ditawarkan dan juga karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri mengakibatkan masyarakat mudah sekali untuk menerima *money politics* tersebut.

### Daftar nama informan:

Lusida Harriandiny

Syifa Putri Iskandar

Hilda Lestari

Revalina Devia

Marsaulina Margaretha

Muhamad Arly Aryana

Nur Rizky Eka Putra

Rakha Ridhyu Rasyadan

## HASIL PENELITIAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa terhadap *money politics* sangat tinggi dan mereka menyadari bahwa itu sangat berbahaya dan dapat merusak demokrasi bangsa. Temuan ini menyoroti pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat khususnya mahasiswa terhadap kasus *money politics* yang marak terjadi selama pemilihan umum. Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami *money politics* lebih baik dan menyadari dampak negatifnya. Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi perlunya dukungan langsung dari pemerintah dalam memberikan edukasi terkait pendidikan politik, seperti mengadakan seminar untuk masyarakat menengah kebawah atau penyuluhan agar masyarakat mendapatkan pendidikan politik.

Pendidikan politik merupakan elemen fundamental dalam membangun kesadaran politik masyarakat, karena tanpa pemahaman yang memadai tentang hak dan tanggung jawab politik, individu cenderung tidak menyadari posisi mereka dalam sistem politik, yang dapat mengakibatkan ketidakaktifan dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Praktik *money politics* yang masih marak menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan tindakan masyarakat; meskipun mahasiswa menyadari bahwa *money politics* dapat merusak demokrasi, faktor-faktor seperti tekanan ekonomi dan kurangnya pendidikan politik membuat mereka rentan terhadap praktiknya. Oleh karena itu, semestinya pemerintah memberikan dukungan dalam pendidikan politik kepada masyarakat, dengan menciptakan program-program edukasi yang dapat menjangkau masyarakat luas, terutama kelompok yang kurang teredukasi, melalui seminar, lokakarya, dan penyuluhan.

Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang politik dan dampak dari praktik-praktik seperti *money politics* akan lebih mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap para pemimpin dan institusi politik, sehingga pendidikan politik tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesadaran individu, tetapi juga untuk memperkuat demokrasi secara keseluruhan dan terdapat hubungan yang dekat antara tingkat pendidikan politik dan tingkat partisipasi politik; masyarakat yang teredukasi

cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam PEMILU dan giat politik lainnya. Oleh karena itu, meningkatkan pendidikan politik di kalangan masyarakat muda pasti berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik yang lebih luas dan berkualitas. Upaya kolektif dari individu, masyarakat, dan pemerintah diperlukan untuk mencapai tujuan ini, sehingga pendidikan politik dapat menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan aktif dalam kehidupan politik serta mencegah praktik-praktik yang merusak demokrasi seperti money politics.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan politik dalam membangun kesadaran politik masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa, serta dampak negatif dari praktik politik uang yang masih umum terjadi dalam pemilihan umum. Pendidikan politik, seperti yang dijelaskan dalam bagian metodologi, berfungsi sebagai sarana untuk membentuk individu yang memahami posisi politik mereka, dan memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik serta menciptakan individu yang menyadari status dan peran mereka dalam masyarakat.

Hasil wawancara dengan mahasiswa Universitas Bung Karno menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki pemahaman yang baik tentang politik uang, praktik tersebut tetap berlangsung dan dianggap sebagai hal yang wajar. Mahasiswa menyadari bahwa politik uang dapat merusak demokrasi, namun faktor-faktor seperti tekanan ekonomi dan kurangnya pendidikan politik menjadi penyebab utama mengapa praktik ini masih diterima masyarakat, terutama menengah ke bawah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari politik uang dan untuk mendorong mereka agar tidak terjebak dalam praktik yang merugikan tersebut. Penelitian ini juga menekankan bahwa pendidikan politik bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Diharapkan pemerintah dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat, terutama melalui seminar dan penyuluhan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang kurang teredukasi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami visi dan misi calon pemimpin serta menilai mereka berdasarkan kriteria yang lebih substansial, bukan hanya berdasarkan imbalan materi.



Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan politik berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar politik dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Peningkatan pendidikan politik bisa diharapkan masyarakat agar bisa menghindari praktik politik uang dan berkontribusi pada terciptanya sistem politik yang lebih sehat dan demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] KPU, 26 July 2018. [Online]. Available: <https://peraturan.go.id/id/peraturan-kpu-no-23-tahun-2018>.
- [2] S. Roger, Representasi Kepentingan Rakyat pada Pemilu Legislatif 2009, Salatiga: Pustaka Pelajar, 2010.
- [3] G. Heryanto, Komunikasi Politik Sebuah Pengantar, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- [4] H. S. Al Muchtar, "Pemilu dan Pendidikan Demokrasi," *Mimbar Pendidikan*, vol. XVIII, no. 1, pp. 4-14, 1999.
- [5] R. Hartono, Fungsi dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta., 2016.
- [6] P. Pasaribu, "Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, vol. 5, no. 1, 2017.
- [7] S. Danin, Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora. ; Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- [8] I. S. d. Wekke, Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta: Gawe buku, 2019.